

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar.” Terwujudnya Indonesia sebagai negara demokrasi ini karena negara menghormati hak asasi manusia dalam memberikan rakyat Indonesia suara. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.

Demokrasi adalah kompetisi, kompetisi untuk mencari wakil-wakil rakyat yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Tidak mengherankan jika partai politik berkompetisi jauh-jauh hari sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Pertarungan ide-ide dan image politik mewarnai masa kampanye dengan berbagai strategi kampanye guna memenangkan pasar politik. Inilah pemilihan umum (pemilu) anak kandung demokrasi yang dijalankan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan.

Pada tanggal 27 Juni 2018 telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Seratus tujuh puluh satu daerah berpartisipasi dalam pilkada serentak 2018, meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten (sumber detik.com). Pilkada serentak sebelumnya pernah terselenggara dua kali yaitu tahun 2015 dan 2017. Diselenggarakannya pilkada serentak bukan tanpa alasan, pilkada serentak dilaksanakan untuk mengefisiensikan anggaran, menekan pelanggaran dan kecurangan serta meminimalisir gejala sosial politik dari pilkada sebelumnya yang dilaksanakan secara terpisah di setiap periode masa jabatan setiap kepala daerah.

Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu kabupaten yang berpartisipasi pada pilkada serentak 2018. Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati bersaing untuk merebutkan kursi Tulungagung satu. Pasangan dari nomor urut satu yaitu Margiono – Eko Prisdianto didukung oleh partai Golkar, Demokrat, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Hanura, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. Dari pasangan Nomor urut dua yaitu pasangan petahana Syahri Mulyo – Maryoto Birowo didukung PDI Perjuangan dan Nasdem.

Partisipasi petahana sebagai kandidat pada pilkada 2018 lebih tinggi dibandingkan pilkada 2017, dengan presentase 16,61% pada tahun 2017 dan 19,49% pada pilkada 2018. Calon petahana paling banyak terdapat pada pilkada kota/kabupaten yaitu 106 orang. Peningkatan partisipasi petahana sebagai kandidat tersebut tentu ditentukan dari kalkulasi peluang kemenangan dengan salah satu tolak ukurnya adalah meningkatnya kepercayaan publik (*public truth*) terhadap kinerja petahana. Sehingga 64 pasangan petahana terpilih kembali untuk memimpin daerah yang pernah ia pimpin untuk periode selanjutnya.

Syahri Mulyo telah berakhir masa jabatannya sebagai Bupati Tulungagung pada 30 April 2018, kemudian maju berlaga pada pilkada Tulungagung 2018 untuk periode jabatan 2018 - 2023. Namun sebelum mendaftar di KPU, Syahri Mulyo – Maryoto Birowo sempat mendapat pertentangan dari sejumlah kader PDIP. Namun pertentangan itu kandas karena DPP PDIP tetap memberikan rekomendasi terhadap pasangan tersebut. Bahkan sekjen PDIP Hasto Kristianto langsung turun ke Tulungagung untuk meneguhkan komitmen para kadernya untuk mendukung pasangan yang direkomendasi oleh pengurus pusat tersebut (sumber detik.com). Akhirnya pasangan petahana melenggang ke pilkada dan ditetapkan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati melawan pesaingnya Margiono – Eko Prisdianto yang diusung koalisi Sembilan partai politik.

Pada musim kampanye, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT di wilayah Blitar dan Tulungagung pada hari Rabu, 6 Juni 2018 dalam

dugaan kasus suap terhadap dua kepala daerah. KPK membidik Syahri Mulyo dan Walikota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar tetapi KPK gagal menangkap keduanya, KPK hanya berhasil menyita uang dua miliar rupiah dan menangkap empat orang dari pihak swasta dan kepala dinas PUPR kabupaten Tulungagung (sumber Tempo.co). KPK menduga Syahri Mulyo menerima uang sebesar 2,5 miliar dari kontraktor Susilo Prabowo terkait proyek infrastruktur di Dinas PUPR Tulungagung.

Syahri Mulyo sempat menghilang beberapa hari, namun pada Sabtu, 9 Juni 2019 dia akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Pada waktu menghilangnya Syahri Mulyo sempat konferensi pers melalui video berdurasi 27 detik. Dalam video tersebut Syahri Mulyo mengatakan dirinya menjadi korban politik. “Kepada simpatisan dan relawan Sahto, biarlah saya menjadi korban politik.” Hingga akhirnya 19 hari sebelum pencoblosan Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Meski ditahan KPK, Syahri memenangkan pilkada Tulungagung 2018. Syahri Mulyo dan pasangannya Maryoto Birowo berhasil unggul 356.201 suara atau 60 persen dibanding lawannya Margiono – Eko Prisdianto dengan 237.775 suara atau 40 persen. Dari pihak lawan sudah menerima kekalahan. “KPU sudah bekerja dengan baik (terkait rekapitulasi)” kata salah satu saksi pasangan Margiono (sumber detik.com).

Dalam memutuskan kepada siapa suara diberikan, menurut Popkin (1994), “penggunaan paling kritis heuristik representasi melibatkan proyeksi penilaian pribadi tentang seorang kandidat ke penilaian tentang pemimpin seperti apakah ia pada jabatan sebelumnya atau ke penilaian tentang presiden seperti apakah ia dimasa yang akan datang.”

Pemilihan umum (pemilu) adalah arena politik. Pemilu menjadi ajang/arena pertarungan gagasan dan program-program politik. Seperti yang dijelaskan oleh Lasswell politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana atau dalam istilah lain disebutkan bahwa politik adalah seni untuk memperoleh kekuasaan. Politik tidak hanya soal perbutan kekuasaan, namun lebih penting dari itu, politik adalah seni menggunakan kekuasaan untuk

kepentingan rakyat (umum). Jika itu terjadi maka kompetisi politik adalah pemenuhan hajat demokrasi. Menjadi politisi, berarti menjadi punggawa demokrasi.

Kehadiran massa di lapangan ketika partai politik atau kandidat politik kampanye tidak dapat dijadikan indikator dukungan massa yang *real*. Tidak menolak kemungkinan jika perilaku pemilih bisa berubah-ubah. Jika jumlah massa yang menyatakan dukungan kepada kandidat atau partai politik tidak dikelola dengan baik justru akan menjadi bumerang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berubah-ubahnya perilaku memilih, adalah perilaku elite politik lokal; politik primordial kekuasaan; konsep rakyat (M. Setiadi dan Usman, 2015:159).

Untuk menciptakan loyalitas konstituen terhadap partai politik atau kandidat individu, diperlukan pengembangan hubungan relasional dengan masyarakat, karena masing-masing kandidat berharap bahwa partai politik mereka dapat terus memenangkan pemilu di masa-masa mendatang. Hal tersebut tidak akan tercapai tanpa loyalitas pemilih. Konstituen yang loyal akan mengurangi ketidak pastian yang berkecamuk di tengah-tengah para pemilih dalam memilih partai politik tertentu.

Hampir seluruh negara di dunia ini, khususnya yang menganut sistem demokrasi, *marketing* politik merupakan sesuatu yang sangat penting. Partai politik di negara manapun telah menjadikan *marketing* politik sebagai alat dalam proses kampanyenya. Penggunaan metode *marketing* dalam dunia politik membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Hubungan ini diartikan secara luas, dari kontak fisik selama periode kampanye sampai dengan komunikasi tidak langsung melalui pemberitaan di media massa.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kampanye jangka pendek atau kampanye pemilu seperti yang disebut Firmanzah (2012) diungkapkan hanya berdampak kecil terhadap perilaku pemilih. Kampanye jangka pendek ini dicirikan dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kontestan,

ketidakpastian hasil dan pengarahannya semua bentuk usaha untuk menggiring pemilih ke bilik-bilik pencoblosan serta memberikan suara kepada mereka (Kahn & Kenney, 1999). Firmanzah (2012) dalam bukunya *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, menyebutkan kampanye yang tidak sebatas periode tertentu disebut kampanye politik. Kampanye politik adalah proses komunikasi yang dialogis antara partai politik dengan masyarakat. Kalau kampanye politik sebatas kampanye pemilu dikhawatirkan tidak akan tercipta kesamaan pemahaman politik diantar kedua belah pihak. Perhatian kampanye politik tidak hanya terbatas pada periode menjelang pemilu, tetapi sebelum dan setelah pemilu juga berperan penting dalam pembentukan *image* politik yang nantinya akan memengaruhi perilaku pemilih dalam mengevaluasi kontestan.

Oleh sebab itu kampanye politik yang tidak sebatas periode tertentu, serta dengan penerapan *marketing* politik dilakukan guna memperoleh dukungan dari masyarakat. Dalam hal ini peneliti membahas Syahri Mulyo dalam pilkada Kabupaten Tulungagung 2018, ditengah statusnya sebagai tersangka kasus suap, tetapi bersama pasangannya justru memenangkan pilkada Kabupaten Tulungagung 2018. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti memfokuskan penelitian pada kampanye politik Syahri Mulyo – Maryoto Birowo dalam pemilihan kepala daerah Tulungagung 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kampanye politik yang dilakukan Syahri Mulyo – Maryoto Birowo terkait kemenangannya dalam pilkada kabupaten Tulungagung 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan maka penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui kampanye politik serta penerapan *marketing* politik yang dilakukan Syahri Mulyo - Maryoto Birowo terkait kemenangannya dalam pilkada kabupaten Tulungagung 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan dan kajian teori komunikasi politik.
2. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya terkait komunikasi politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang penulis peroleh selama masa perkuliahan dan serta memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat khususnya untuk edukasi politik.